

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu permasalahan yang dihadapi secara serius oleh setiap Negara didunia adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan bisa terjadi dimana saja dan dimensi kemiskinan itu sangatlah luas. Kemiskinan bisa saja terjadi dikalangan masyarakat manapun, bisa terjadi diberbagai tingkat usia manapun maupun diberbagai tingkat pendapatan masyarakat.

Persoalan kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrument tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki posisi mereka.

Menurut Mudrajat Kuncoro kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian : kemiskinan *absolut*, kemiskinan *relatif* dan kemiskinan kultural. Seseorang termasuk golongan miskin *absolut* apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum: pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan. Seseorang yang

tergolong miskin *relatif* sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Sedang miskin kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

Lebih lanjut, garis kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kemampuan masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum. Melalui pendekatan sosial masih sulit mengukur garis kemiskinan masyarakat, tetapi dari indikator ekonomi secara teoritis dapat dihitung dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendapatan, dan pengeluaran. Sementara ini yang dilakukan Biro Pusat Statistik (BPS) untuk menarik garis kemiskinan adalah pendekatan pengeluaran.

Kemiskinan menurut Kantor Menteri Negara Kependudukan/ BKKBN (1996: 10) adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri dengan taraf kehidupan yang dimiliki dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya untuk memenuhi kebutuhannya. Miskin atau kurang sejahtera diidentikkan sebagai keluarga sebagai berikut:

- a. Pra Keluarga Sejahtera, adalah keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan spiritual, pangan, sandang, papan, kesehatan, dan keluarga berencana. Secara operasional mereka tampak dalam ketidakmampuan untuk memenuhi salah satu indikator sebagai berikut:
 - Menjalankan ibadah sesuai agamanya

- Makan minimal 2 kali per hari
 - Pakaian lebih dari satu pasang
 - Sebagian besar lantai rumahnya bukan dari tanah
 - Jika sakit dibawa ke sarana kesehatan
- b. Keluarga Sejahtera I, adalah keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis, seperti kebutuhan pendidikan, interaksi dalam keluarga, interaksi dalam lingkungan tempat tinggal, dan transportasi. Secara optimal mereka tidak mampu memenuhi salah satu indicator sebagai berikut:
- Menjalankan ibadah secara teratur
 - Minimal seminggu sekali makan daging/telur/ikan
 - Minimal memiliki baju baru sekali dalam setahun
 - Luas lantai rumah rata-rata 8 m² per anggota keluarganya
 - Tidak ada anggota keluarga yang berusia 10 – 60 tahun yang buta huruf latin
 - Semua anak berusia 7 – 15 tahun bersekolah
 - Salah satu anggota keluarga berpenghasilan tetap
 - Dalam 3 bulan terakhir tidak sakit dan masing dapat melaksanakan fungsinya dengan baik

Berdasarkan data yang diterbitkan lembaga terkait, baik data yang berasal dari Susenas dan BPS maupun lembaga-lembaga terkait lainnya menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia khususnya perkotaan mengalami

penurunan, namun sebaliknya.. Ini dapat kita lihat juga bahwa semakin banyak industri besar yang gulung tikar sehingga melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya secara besar-besaran. Padahal industri-industri besar ini merupakan sektor industri yang mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang sangat banyak.

Selain itu, beban masyarakat miskin makin berat akibat besarnya tanggungan keluarga dan adanya tekanan hidup yang mendorong terjadinya migrasi. Menurut data BPS, rumah tangga miskin mempunyai rata-rata anggota keluarga lebih besar daripada rumah tangga tidak miskin. Rumah tangga miskin di perkotaan rata-rata mempunyai anggota 5,1 orang, sedangkan rata-rata anggota rumah tangga miskin di pedesaan adalah 4,8 orang. (Strategi Penanggulangan Kemiskinan : 27)

Masyarakat miskin di pedesaan sering kali terpaksa pindah ke kota dengan harapan akan mendapatkan kesempatan kerja untuk memperoleh pendapatan. Akibat langsung dari urbanisasi adalah meningkatnya beban kota dalam menyediakan fasilitas layanan publik dan lapangan kerja, dan meningkatnya pemukiman di bantaran sungai, pinggiran rel, kolong jembatan, dan lahan kosong lainnya. Kondisi kehidupan yang kurang layak di perkotaan diperparah dengan besarnya beban tanggungan keluarga. Inilah mengapa dalam kenyataannya jumlah penduduk miskin di perkotaan tidak mengalami penurunan bahkan dapat dikatakan tetap dan cenderung naik.

Begitu pula yang terjadi di Provinsi Jawa Barat. Hal ini dibuktikan pula dengan melihat hasil susenas (survey sosial dan ekonomi nasional) tahun 2009

jumlah penduduk miskin propinsi Jawa Barat yakni 11,96% dari jumlah penduduk. Menurut BPS, tahun 2009 jumlah penduduk di propinsi Jawa Barat sebesar 41.483.729 jiwa. Ini berarti jumlah penduduk miskin di propinsi Jawa Barat sebesar 4.961.454 jiwa.

Terkadang yang kita ketahui, kemiskinan banyak terjadi di daerah-daerah terpencil saja. Namun tentu saja, kemiskinan bisa terjadi di mana saja. Begitupun dengan ibukota propinsi Jawa Barat yaitu Kota Bandung. Berikut adalah angka kemiskinan di beberapa kecamatan di Kota Bandung:

Tabel 1.1

Angka kemiskinan di beberapa Kecamatan di Kota Bandung tahun 2009

No.	Kecamatan	Jumlah KK Pra Keluarga Sejahtera
1.	Antapani	2.231
2.	Mandalajati	1.624
3.	Cibeunying Kaler	1.158
4.	Kiaracondong	2.031
5.	Sukajadi	108
6.	Bandung Wetan	75
7.	Batununggal	204
9.	Coblong	408
10.	Lengkong	189
11.	Cibeunying Kidul	40
12.	Buah Batu	25
13.	Bandung Kidul	1.708
14.	Bojongloa Kidul	181
15.	Arcamanik	110
16.	Cinambo	312
17.	Gedebage	167
18.	Cibiru	110

Sumber: BPS, Bandung Dalam Angka 2010

Dari data diatas, membuktikan bahwa beberapa kecamatan di Kota Bandung memiliki jumlah penduduk dengan kategori Pra KS yang cukup tinggi.

Selain itu, terlihat juga bahwa kecamatan Antapani yang memiliki jumlah jiwa dengan kategori Pra KS yang paling tinggi.

Kecamatan Antapani merupakan pemekaran dar Kecamatan Cicadas yang diresmikan pada bulan april 2007. Pemekaran tersebut dilakukan untuk mengurangi kepadatan penduduk. Dan saat ini dari pemekaran tersebut menjadi dua kecamatan yaitu Kecamatan Mandalajati dan Kecamatan Antapani.

Kecamatan Antapani berlokasi di tengah kota Bandung yang selayaknya memiliki jumlah jiwa kategori Pra KS yang lebih sedikit. Selain karena lokasinya dipusat kota, akses transportasi darat di kecamatan Antapani cukup baik, dan ditunjang dengan sarana dan prasarana pendukung lain yang cukup baik.

Inilah mengapa Kecamatan Antapani menjadi tujuan urbanisasi. Selain ditunjang dengan sarana dan prasarana pendukung lain yang cukup baik, di Kecamatan Antapani pun berdiri beberapa komplek pemukiman yang cukup padat. Itulah yang menjadi alasan banyak warga pendatang ke Kecamatan Antapani dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan yang lebih baik. Namun sebagian besar warga pendatang tidak memiliki latar belakang pendidikan formal yang tinggi. Alhasil sebagian besar pendatang hanya menjadi pedagang kecil saja.

Migrasi warga pendatang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan formal yang tinggi ke Kecamatan Antapani inilah salah satu penyebab tingginya angka kemiskinan di Kecamatan Antapani. Adapun di bawah ini data angka kemiskinan di kecamatan Antapani berdasarkan Pra KS:

Tabel 1.2
Angka Kemiskinan di Kecamatan Antapani 2009

No.	Nama Kelurahan	Jumlah KK Pra Keluarga Sejahtera
1.	Antapani Kidul	480
2.	Antapani Tengah	171
3.	Antapani Wetan	972
4.	Antapani Kulon	608
Jumlah		2.231

Sumber: BPS, Kecamatan Antapani Dalam Angka 2010

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis berusaha untuk menggambarkan bagaimana analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan perkotaan dengan mengambil judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN PERKOTAAN (Suatu Kasus di Kecamatan Antapani Kota Bandung)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang akan dikaji adalah:

- a. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemiskinan ?
- b. Bagaimana pengaruh beban tanggungan terhadap kemiskinan ?
- c. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan, dan beban tanggungan terhadap kemiskinan?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemiskinan.
- b. Untuk mengetahui pengaruh beban tanggungan terhadap kemiskinan.
- c. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan, dan beban tanggungan terhadap kemiskinan

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi beberapa pihak yang terkait diantaranya adalah:

- a. Bagi pembuat kebijakan dapat berguna sebagai bahan informasi dalam melakukan langkah-langkah yang perlu ditempuh guna mengurangi kemiskinan di Indonesia
- b. Bagi kalangan akademis dapat berguna sebagai bahan kajian dalam mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan tentang betapa pentingnya adanya pemerataan kesejahteraan rakyat
- c. Bagi masyarakat luas dapat berguna sebagai bahan informasi yang benar tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan perkotaan khususnya di kecamatan antapani kota Bandung, dan umumnya di Indonesia.